

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Analisa Faktor Penyebab Opini Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2023 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pencatatan dan pelaporan atas beberapa pos terkait dengan akun aset tetap peralatan dan mesin, Konstruksi dalam pengerjaan, dan belanja dibayar dimuka belum sepenuhnya dilaporkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan terkait yang mengatur. Terbukti pada pelaporan akun aset tetap pada LK Kemkominfo Tahun 2022 yang dimana terdapat pengakuan atas KDP yang telah selesai menjadi aset tetap sebesar Rp 7.116.511.227.059 atau sebanyak 2.919 *site*. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK melalui aplikasi *Operation Support System* (OSS) maka tower BTS 4G yang sudah beroperasi dan memiliki nilai fungsi sebanyak 1.423 tower dengan nilai Rp 3.235.761.964.114 dan 1.496 tower lagi belum dapat diyakini kewajarannya dikarenakan tidak didukung oleh bukti dokumen yang cukup dan tepat. Pada kasus ini BAKTI tidak patuh terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aser Tetap, PSAP Nomor 8 tentang Konstruksi Dalam Proses yang sehingga

menimbulkan salah saji yang bersifat material yang mempengaruhi opini auditor.

2. Laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini keliru dan tidak tepat dikarenakan untuk laporan keuangan tahun 2021 sudah mulai terdeteksi adanya indikasi kasus tindak pidana korupsi yang ditandai dengan adanya kelebihan pembayaran pada kontrak paket 1,3, dan 5 pada pengadaan penyediaan BTS 4G *Batch* 1 senilai 18.755.350.111 hal ini menunjukkan adanya kegagalan auditor dalam menilai dan memeriksa Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2021.
3. Terdapat permasalahan integritas yang dilanggar oleh salah satu anggota BPK atas nama Achsanul Qosasi (AQ) yang menerima suap berupa uang tunai senilai USD 2,64 juta atau senilai Rp 40 Miliar. Suap ini diterima oleh AQ dengan menjanjikan akan membuat serta menandatangani hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2022 atas Pemeriksaan Penyediaan BTS 4G Tahun 2021 yang secara substansi akan merubah hasil PDTT Belanja Modal TA 2021 untuk Kemkominfo.
4. Kasus korupsi yang terjadi atas Proyek Penyediaan BTS 4G BLU BAKTI ini menjerat 16 Orang terdakwa yang dimana terdapat 2 orang yang berasal dari lingkungan Kemkominfo atas nama Johnny Gerard Plate (JGP) dan Anang Achmad Latif (AAL).
5. Total kerugian negara yang diprediksi BPK senilai Rp 9.436.344.775.313 yang merupakan nilai aset BTS 4G yang terdampak

yang dimana biaya ini belum termasuk kapitalisasi biaya perencanaan yang disesuaikan di Tahun 2024. Sedangkan menurut perhitungan Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa negara mengalami kerugian senilai Rp 8.032.084.133.795,51 yang telah dibunyikan dalam putusan pengadilan Nomor 3448 K/Pid.Sus/2024

6. Pada tahun 2022 faktor korupsi ini sangat memiliki dampak yang material atas penyajian aset-aset pos peralatan dan mesin serta KDP yang dimana proses peradilannya masih berlanjut hingga tahun 2023. Terdapat beberapa kendala BAKTI dalam melakukan revisi terhadap salah saji yang ada yang dimana salah satunya adalah tidak adanya Bank Garansi yang menyebabkan BAKTI tidak dapat melakukan revisi saldo, sehingga akibat dari permasalahan ini pada Laporan Keuangan Tahun 2023 juga memiliki dampak yang material sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomo 14 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoritis, temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan terkait faktor penyebab pemberian opini audit yang harus diperhatikan lagi terutama faktor *fraud* seperti korupsi yang terungkap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi BPK untuk mempertimbangkan pemberian opini audit pada LKKL di masa yang akan datang. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber evaluasi dan referensi bagi BPK untuk selalu

menjaga 3 pilar utama BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang bersumber pada data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang ada sehingga menimbulkan beberapa keterbatasan penelitian berikut:

1. Penelitian ini berfokus kepada faktor penyebab berupa kasus korupsi yang terjadi terkait penyediaan BTS 4G BLU BAKTI yang memiliki dampak material pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2023.
2. Masih minimnya penelitian yang membahas terkait dampak korupsi atas opini audit.
3. Periode penelitian ini terbatas pada tahun 2020 hingga 2023 yang dimana terdapat kasus tindak pidana korupsi Penyediaan BTS 4G BLU BAKTI.

5.4 Saran Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian sejauh ini, maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk:

1. Melakukan analisis yang lebih umum dan general untuk melihat faktor penyebab opini audit WDP diberikan pada Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2022-2023.

2. Melakukan penelitian yang sama agar dapat menambah sumber referensi terkait dengan faktor penyebab pemberian opini WDP pada suatu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
3. Menambah data berupa data primer berupa hasil wawancara ataupun pembagian kuisioner supaya menambah referensi data penelitian berikutnya.
4. Menambah periode penelitian pada tahun 2024, dikarenakan proses hukum yang masih berjalan dan belum bersifat inkraacht untuk melihat dampaknya untuk Laporan Keuangan Kemkominfo/Komdigi Tahun 2024.

